

BAB II

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan pendekatan baru untuk memajukan kesejahteraan manusia. Menurut UNDP, pendekatan pembangunan manusia merupakan suatu proses yang menekankan pada perluasan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan semata-mata pada peningkatan kekayaan ekonomi. Pendekatan ini berorientasi pada manusia sebagai inti pembangunan, dengan fokus pada perluasan pilihan, kesempatan, dan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai bagi mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menurut UNDP tersebut juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan individu secara holistik, tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Dalam pendekatan ini, manusia diposisikan sebagai pusat dari setiap upaya pembangunan, di mana keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai alternatif kehidupan yang layak. Pembangunan manusia menekankan pentingnya memperluas ruang gerak individu dalam menentukan arah hidupnya melalui ketersediaan pilihan, peluang untuk berkembang, serta kebebasan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup masing-masing.

Dalam bukunya yang berjudul *Development as Freedom*, Amartya Sen (1999) mengembangkan pendekatan yang dikenal dengan Pendekatan Kapabilitas, pendekatan tersebut menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan atau kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Kapabilitas

mencerminkan kebebasan seseorang untuk memilih, bertindak, dan menjadi sesuai dengan apa yang mereka hargai dalam hidupnya.

Dengan pendekatan kapabilitas tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan sejatinya tidak cukup jika hanya dinilai dari indikator ekonomi seperti pendapatan. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana individu memiliki kapasitas dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang mereka pandang berharga. Dalam hal ini, kapabilitas mencerminkan peluang nyata yang dimiliki seseorang untuk membuat pilihan hidup yang bermakna, baik dalam hal bertindak, berkontribusi, maupun menjadi pribadi yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan manusia secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek material, tetapi juga pada perluasan kebebasan dan kesempatan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dalam karyanya yang berjudul *Reflection on Human Development*, Mahbub ul Haq (1995) menyampaikan bahwa esensi dari pembangunan manusia terletak pada upaya untuk memperluas ragam pilihan yang dapat diakses oleh setiap individu. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Konsep pembangunan manusia menurut Mahbub ul Haq tersebut menitikberatkan pada pentingnya memperluas berbagai pilihan hidup yang tersedia bagi setiap individu, sehingga mereka memiliki keleluasaan untuk menentukan arah hidup yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam pandangan ini, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan nasional, melainkan dari seberapa besar individu memiliki akses terhadap kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan yang layak, menikmati layanan kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan manusia menekankan bahwa indikator ekonomi saja tidak cukup untuk merepresentasikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai teori dan pendekatan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi individu. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan seseorang tidak dapat diukur dari satu dimensi saja, melainkan harus dilihat juga dari berbagai indikator lain yang mencerminkan sejauh mana kemajuan pembangunan telah dicapai oleh masing-masing individu.

2.1.2 Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan baik pajak maupun non-pajak dan pengeluaran (belanja pemerintah dan transfer dana). Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengendalian inflasi.

Dalam pandangan N. Gregory Mankiw (2006) melalui karyanya *Principle of Economics*, kebijakan fiskal diartikan sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan negara, khususnya melalui mekanisme perpajakan, guna memengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini diterapkan untuk mencapai tujuan makroekonomi, antara lain menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan ekspansif, mengendalikan inflasi dengan kebijakan kontraktif, serta menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Madjid, Kemenkeu RI 2012 (dalam DJKN, 2017) kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah dalam mengatur belanja negara dan sistem perpajakan melalui instrumen fiskal dengan tujuan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi.

Instrumen fiskal terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengeluaran pemerintah dan penerimaan dari perpajakan. Melalui pengaturan keduanya, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, serta mendukung pemerataan pembangunan. Salah satu bentuk konkret

implementasi dari kebijakan fiskal di Indonesia adalah melalui transfer dana ke daerah, termasuk DAK.

Dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Public Finance*, Richard Abel Musgrave (1959) mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga peran utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak mampu disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan guna menciptakan pemerataan dan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada upaya menjaga kestabilan perekonomian, termasuk pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan penciptaan stabilitas ekonomi makro.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memanfaatkan beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar kebijakan fiskal menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis pengaruhnya terhadap pembangunan. Berikut merupakan beberapa konsep dasar dalam kebijakan fiskal (Sudarmanto, *et al.*, 2024):

1. Pengeluaran publik, merujuk pada total dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang bersifat publik. Pemerintah memanfaatkan belanja ini guna mendukung pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pendapatan publik, seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak atas properti, serta pendapatan yang berasal dari kepemilikan aset negara. Dana yang diperoleh melalui pendapatan publik ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara, termasuk pengeluaran pemerintah dan penyediaan layanan publik lainnya.

3. Pajak, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran publik. Jenis-jenis pajak yang dipungut meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak atas kepemilikan properti, serta berbagai jenis pajak lainnya.
4. Subsidi, merupakan bentuk finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor atau industri tertentu sebagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor tersebut atau mencapai tujuan kebijakan tertentu. Bantuan ini dapat disalurkan secara langsung, seperti pemberian dana tunai, maupun secara tidak langsung, misalnya melalui pemberian insentif pajak.
5. Defisit anggaran, terjadi ketika total pengeluaran pemerintah melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti menurunkan tingkat pengeluaran, meningkatkan penerimaan negara, atau melakukan pinjaman guna menutupi kekurangan anggaran.
6. Surplus anggaran, terjadi apabila penerimaan pemerintah melebihi jumlah pengeluaran yang dilakukan dalam suatu periode anggaran. Kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melunasi utang negara, memperkuat cadangan keuangan pemerintah, atau dialokasikan untuk mendanai tambahan belanja publik.

Secara keseluruhan, konsep dasar kebijakan fiskal mencakup berbagai komponen penting yang saling berkaitan dalam mendukung peran pemerintah dalam mengelola perekonomian. Pendapatan publik menjadi sumber utama pembiayaan negara yang diperoleh melalui instrumen seperti pajak, sementara pengeluaran publik mencerminkan penggunaan dana tersebut untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakat. Pajak berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan pendapatan negara, sedangkan subsidi digunakan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mendorong sektor-sektor strategis. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat menghasilkan defisit anggaran, yang memerlukan

strategi penyesuaian atau pembiayaan tambahan, atau sebaliknya menghasilkan surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keuangan negara. Pemahaman menyeluruh terhadap elemen-elemen ini menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, pemerintah menerapkan dua jenis kebijakan fiskal utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kedua jenis kebijakan ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, tergantung pada apakah pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi atau justru menekan laju inflasi dan defisit anggaran. Berikut merupakan dua jenis kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah (Sudarmanto, *et al.*, 2024):

1. Kebijakan fiskal ekspansif

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat terjadi resesi atau peningkatan angka pengangguran. Melalui peningkatan belanja negara dan/atau penurunan pajak, pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi dan aktivitas ekonomi kembali tumbuh.

2. Kebijakan fiskal kontraktif

Kebijakan ini diterapkan untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi peningkatan inflasi yang terlalu cepat. Berbanding terbalik dengan kebijakan fiskal ekspansif, pendekatan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan pajak dan mengurangi belanja pemerintah.

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan manusia, terutama instrumen belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut pandangan Musgrave (1959), pengelolaan fiskal yang efektif tidak hanya berfungsi dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan fiskal mampu memperluas akses individu terhadap layanan dasar yang esensial, serta menciptakan lingkungan

sosial dan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, belanja pemerintah yang teralokasi secara tepat dapat memperkuat kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang krusial dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Salah satu bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perbedaan kebutuhan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab pelaksanaan DAK masih belum optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tertulis bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK tersebut berupa DAK fisik, DAK nonfisik, dan Hibah ke Daerah. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan membantu kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK nonfisik merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu yang bertujuan membantu pendanaan kegiatan khusus nonfisik yang menjadi urusan daerah (Pambudi, 2021)

DAK fisik terbagi menjadi beberapa fokus, dan pada setiap fokusnya terdapat beberapa bidang pembangunan. Menurut penjelasan pada UU HKPD, DAK fisik disesuaikan dengan memuat hal yang berhubungan dengan percepatan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu.

Adapun beberapa topik yang sesuai dengan fokus tersebut dalam APBN Tahun 2023 adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022) :

1. DAK fisik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, dan Bidang Sanitasi
2. DAK fisik mendukung konektivitas daerah, yaitu Bidang Jalan
3. DAK fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, topik tersebut terdiri dari tiga tematik, yaitu:
 - a. Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas
 - b. Tematik penanganan kawasan kumuh
 - c. Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi
4. DAK fisik mendukung ketahanan pangan yang terdiri dari dua tematik, yaitu:
 - a. Tematik pengembangan food estate
 - b. Tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan sektor pertanian, perikanan, dan hewan

Berdasarkan Undang Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), DAK nonfisik merupakan bagian DAK yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Beberapa jenisnya antara lain:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dialokasikan untuk pendanaan belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. BOS terdiri atas:
 - a. BOS Reguler, diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)
 - b. BOS Kinerja, digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah

2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu
3. Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal
4. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, terdiri atas:
 - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dikerahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah
 - b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - c. Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah diberikan kepada guru ASN Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya
5. Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Museum dan Taman Budaya, digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), ditujukan untuk mendukung delapan area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana

8. Dana Pelayanan Kepariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata di 19 Destinasi Pariwisata dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta Inkubasi Wirausaha
10. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan
11. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA), ditujukan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
12. Dana Fasilitas Penanaman Modal (DFPM), ditujukan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal
13. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
14. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SKIM), ditujukan untuk mendanai kegiatan bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM

Dana hibah kepada daerah ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembagian dana hibah ke daerah secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya terdiri dari tiga macam, yaitu pinjaman luar negeri yang diterushibahkan, hibah luar negeri yang diterushibahkan, dan penerimaan dalam negeri yang dihibahkan. Program hibah ke daerah tersebut ditujukan untuk mendukung bidang perhubungan, penyediaan infrastruktur daerah, dan penanganan kondisi bencana (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, 2022)

Dengan demikian, DAK memainkan peran penting dalam meningkatkan standar layanan dasar termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selain sebagai alat untuk mendanai pembangunan daerah. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada seberapa baik DAK digunakan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi DAK di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan terhadap peningkatan IPM Kabupaten Kebumen, maka penting untuk mengkaji hal tersebut dalam penelitian ini.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pada Tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan oleh UNDP sebagai metrik utama untuk mengevaluasi pencapaian pertumbuhan manusia. IPM memperhitungkan sejumlah metrik penting yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kesehatan, Pendidikan, dan pendapatan per kapita. Angka harapan hidup digunakan untuk mengevaluasi kesehatan, sedangkan rata-rata jumlah tahun pendidikan untuk orang di atas 25 tahun serta jumlah tahun pendidikan yang diharapkan untuk anak-anak yang baru mulai bersekolah digunakan untuk mengukur pendidikan (United Nations Development Programme, 2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah serta dinyatakan dalam suatu angka indeks. Dasar perhitungan IPM adalah komponen-komponen dasar dasar kualitas hidup manusia, seperti angka harapan hidup serta

kesehatan, ilmu pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Badan Pusat Statistika (BPS) membagi kategori capaian IPM menjadi empat klasifikasi, yaitu sangat tinggi (nilai IPM di atas 80), tinggi (nilai IPM di antara 70 dan 80), sedang (nilai IPM di antara 60 dan 70), dan rendah (nilai IPM di bawah 60) (Nashshar & Mulyana, 2022)

IPM pada daerah tertentu merupakan indeks pengukuran yang menunjukkan besarnya tingkat kemajuan suatu daerah dengan dilihat dari pembangunan sumber daya manusia daerah tersebut. Dengan IPM tersebut, secara aplikatif akan menjadi landasan konseptual bagi daerah untuk mengapresiasi suatu keberhasilannya dalam kinerja memajukan pembangunan yang telah dilaksanakan (Fahrurrozi, et al., 2023) IPM merupakan indikator strategis yang seringkali digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam konteks tersebut, IPM didefinisikan sebagai hasil dari program pembangunan sumber daya manusia yang sudah dilaksanakan di suatu daerah dan kemajuan dari program tersebut dalam suatu periode akan diimplementasikan dalam angka IPM (Sari, Winarni, & Amali, 2021)

IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat dideskripsikan dengan angka Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur oleh Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia di atas 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) digambarkan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak dihitung dari pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan oleh setiap daerah. IPM sendiri dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran (Lukito, 2022)

Berikut merupakan penjelasan mengenai indikator IPM (Azfirmawarman, Magriasti, & Yulhendri, 2023):

1. Indeks harapan hidup, merupakan rerata jangka waktu yang dapat dijalani oleh seseorang dalam hidupnya, dan biasa dikenal dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk pengukuran AHH menggunakan metode tak langsung dengan mengambil data dari perhitungan Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Standar oleh UNDP dimanfaatkan dalam memperkirakan nilai maksimal dan nilai minimal kemungkinan rentang usia seseorang untuk menghasilkan indeks, dengan batas atas di usia 85 tahun dan batas bawah di usia 25 tahun.
2. Indeks pendidikan, memperhitungkan rata-rata tahun yang dihabiskan di dunia pendidikan serta nilai melek huruf. Adapun batas usia yang ditetapkan untuk menghitung rentang masa sekolah yakni 15 tahun. Sementara itu, untuk batas minimum dan maksimum untuk menunjukkan angka melek huruf masing-masing berada di 100 dan 0. Penduduk dengan 100% mahir dalam membaca serta menulis akan dicerminkan dengan angka 100, sedangkan untuk penduduk yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, akan dicerminkan dengan angka 0.
3. Indeks standar hidup layak, menggambarkan mutu kehidupan seseorang dan kriteria ini didefinisikan sebagai ukuran kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk dengan terbentuk dari hasil perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita untuk menentukan indeks standar hidup layak tersebut.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara disebut sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dapat melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, dalam hal harapan hidup, intelektualitas, dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk

memperoleh pendapatan yang cukup, kesehatan, dan pendidikan yang memadai (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah, 2022)

Pada publikasi BPS dalam (Azfirmawarman, Magriasti, & Yulhendri, 2023) memaparkan beberapa manfaat IPM adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. IPM menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah
3. IPM dimanfaatkan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) karena datanya yang cukup strategis bagi Indonesia

Pada tahun 2010, UNDP melakukan revisi yang cukup besar dan disebut dengan era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini, UNDP mengubah indikator melek huruf menjadi harapan lama sekolah, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita menjadi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Selain itu, penggunaan rata-rata geometrik untuk menggabungkan tiga dimensi utama IPM juga merupakan salah satu perbedaan utama antara pendekatan ini dengan pendekatan sebelumnya. BPS telah menerapkan pendekatan metode baru tersebut untuk menghitung IPM di Indonesia sejak tahun 2014 (BPS, 2019)

Tujuan dari pendekatan dengan metode baru tersebut adalah untuk menyajikan pandangan yang lebih adil dan seimbang tentang pencapaian kemajuan manusia. Skor IPM tidak akan terlalu tinggi jika salah satu komponen sangat rendah karena rata-rata geometrik dapat mencegah satu dimensi mendominasi dimensi lainnya. Selain itu, setiap indikator dinormalisasi ke skala 0 hingga 1 menggunakan batas minimum dan maksimum global yang telah ditetapkan untuk menghitung IPM. Dengan mempertahankan dasar-dasar IPM tersebut sekaligus, dapat meningkatkan akurasi dan sensitivitas terhadap ketidaksetaraan antar dimensi, formulasi IPM yang baru tersebut juga dianggap lebih realistis dalam menggambarkan situasi pembangunan manusia (Fajar, 2021)

Berdasarkan penelitian oleh (Nabila, Fitri, & Arum, 2023) tentang faktor-faktor yang memengaruhi IPM berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2022 dengan variabel independen harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, mendapatkan hasil bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Penelitian tersebut mendapatkan hasil sebesar 0,999 pada pengujian koefisien determinasi atau R-Square.

Pada penelitian lain oleh (Mayapada, Yanti, & Syarifuddin, 2022) mengenai tingkat kepentingan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Indonesia menunjukkan bahwa di antara variabel pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan umur harapan hidup saat lahir, variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap IPM adalah pengeluaran per kapita. Sedangkan angka harapan lama sekolah memiliki pengaruh terendah di antara variabel tersebut. Namun, variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM di Indonesia.

IPM adalah salah satu indikator pembangunan multidimensi yang merupakan alat utama untuk menilai keberhasilan inisiatif pengembangan sumber daya manusia. IPM menunjukkan seberapa baik kinerja suatu wilayah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sangat penting untuk memahami komponen-komponen IPM tersebut. IPM menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, yang akan diteliti untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran DAK untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup penduduk di Kabupaten Kebumen.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan dari apa yang akan dikaji serta merupakan pernyataan yang akan diterima untuk sementara sebagai kebenaran dengan berdasarkan logika, teori-teori ilmu pengetahuan, dan penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks masalah yang

sama (Abdullah, 2015). Tabel 2.1 berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh DAK terhadap IPM di berbagai daerah di Indonesia.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh DAK terhadap IPM

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Saswatata & Parju, 2022)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, memperoleh hasil bahwa pengaruh DAK terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikansi, dengan demikian secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan atas pengaruh DAK terhadap IPM. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
2.	(Silalahi, Arief, & Indrafana, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021	Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan, memperoleh hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ pada pengaruh DAK terhadap IPM Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM di wilayah tersebut.
3.	(Arifin & Azizah, 2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana	Hasil pengujian pengaruh DAK terhadap IPM memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,039 <$

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)	0,05 yang dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM.
4.	(Ina & Hudang, 2024)	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM dengan peningkatan sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054.
5.	(Wati, Ridwansyah, & Dewi, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019	Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, peneliti menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena DAK fisik mendominasi pengalokasian DAK oleh pemerintah yang kemudian direalisasikan untuk pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
6.	(Rizkiyah & Anitasari, 2023)	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Manusia Kabupaten Bojonegoro	terhadap IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019. Peneliti menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena anggaran DAK dimanfaatkan untuk kegiatan yang relevan dengan prioritas nasional dalam meningkatkan fokus untuk kualitas sumber daya manusia yang linear dengan indikator IPM.
7.	(Saputra, <i>et al.</i> , 2023)	Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022	Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyimpulkan jika semakin besar anggaran DAK oleh pemerintah, maka pembangunan manusia di daerah tersebut akan semakin tinggi.
8.	(Fadli, Rosnawintang, & Apoda, 2024)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan uji Eviews dihasilkan nilai probabilitas sebesar $0,140 > 0,05$ dengan pola hubungan negatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pada tabel 2.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa DAK pada beberapa daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian oleh (Wati, Ridwansyah, & Dewi, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019” menghasilkan nilai t hitung pada uji t lebih kecil dari nilai t tabel ($1,415 < 2,00404$), dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,163 > 0,05$) yang artinya variabel DAK tidak memiliki pengaruh terhadap variabel IPM. Selain itu, pada penelitian oleh (Fadli, Rosnawintang, & Apoda, 2024) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara” memperoleh hasil uji menggunakan Eviews dengan nilai probabilitas sebesar $0,140 > 0,05$ dan pola hubungan negatif, oleh karena itu disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

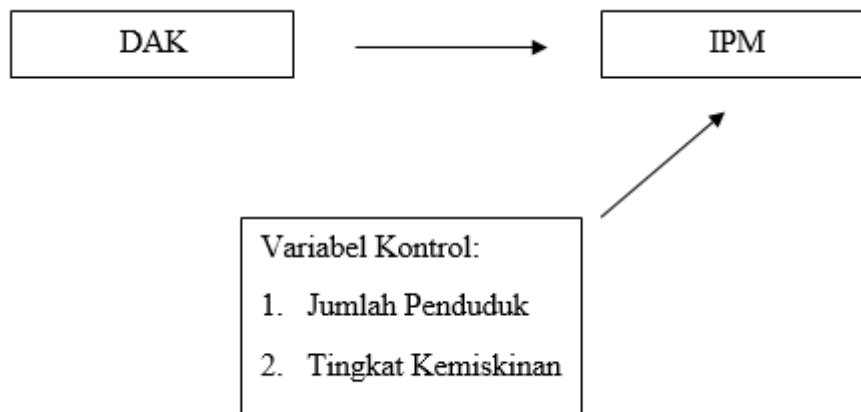
Pada penelitian terdahulu di tabel 2.1 tersebut juga terdapat beberapa penelitian yang memperoleh hasil bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM. Seperti pada penelitian oleh (Ina & Hudang, 2024) dengan meneliti pengaruh DAK terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh hasil positif dengan peningkatan sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054. Kemudian pada penelitian oleh (Rizkiyah & Anitasari, 2023) yang dilakukan dengan populasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro menghasilkan adanya pengaruh positif DAK terhadap IPM. Sementara itu, pada penelitian oleh (Saswatata & Parju, 2022) dengan populasi penelitian Kota Semarang, (Silalahi, Arief, & Indrafana, 2023) dengan populasi penelitian Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, (Arifin & Azizah, 2022) dengan populasi penelitian Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, dan (Saputra, *et al.*, 2023) dengan populasi penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, masing-masing menghasilkan uji data yang berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar $< 0,05$.

Berdasarkan permasalahan pokok serta tinjauan pustaka yang telah dipaparkan oleh penulis, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kebumen
- H_1 : DAK berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Kebumen

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan dan temuan-temuan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibangun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara DAK terhadap IPM. Selain itu, variabel kontrol seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan turut disertakan dalam penelitian ini guna melihat sejauh mana pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas pembangunan manusia.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah